

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan industrial merupakan konsep yang mencakup kerangka kerja kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Secara umum, hubungan industrial memiliki peran penting dalam berbagai sektor, baik itu sektor swasta maupun publik, karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan produktivitas organisasi.

Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar yang dijabarkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berfungsi sebagai kerangka untuk menyelesaikan perselisihan, menetapkan hak dan kewajiban, serta mengatur kesejahteraan dan hubungan kerja. Secara umum, hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis dan adil, dengan memfasilitasi dialog antara semua pihak terkait untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja (Moleong, 2020).

Pada sektor swasta, hubungan industrial sering kali difokuskan pada upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan pekerja, melalui perundingan kolektif, penyelesaian konflik, serta pemberian insentif yang mendukung kesejahteraan pekerja. Namun, dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, peran hubungan industrial memiliki karakteristik yang lebih spesifik, terutama karena melibatkan kepentingan pelayanan masyarakat secara langsung.

Di sektor pemerintahan, hubungan industrial tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara atasan dan pegawai, tetapi juga mencakup kebijakan dan regulasi yang diatur oleh negara dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini sangat penting karena kinerja pegawai pemerintahan, khususnya yang bergerak di bidang pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berpengaruh langsung pada kualitas layanan yang diterima

masyarakat. Jika hubungan industrial di sektor ini tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat menghambat proses pelayanan publik dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Pada tahap awal observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, ditemukan bahwa tantangan hubungan industrial tampak pada aspek komunikasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pegawai merasa bahwa aspirasi dan masukan mereka mengenai kondisi kerja dan kesejahteraan masih bisa ditingkatkan agar selaras dengan tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Di sisi lain, pihak manajemen juga memiliki tuntutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pegawai dan manajemen berpotensi mempererat kerjasama dan mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang konstruktif.

Selain itu, baik manajemen maupun pegawai sama-sama memiliki harapan untuk terciptanya suasana kerja yang lebih mendukung. Manajemen berupaya menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan organisasi, tetapi di lapangan, terdapat kesenjangan antara penerapan kebijakan tersebut dengan kebutuhan pegawai. Misalnya, kebijakan terkait pengaturan tugas dan jam kerja, yang jika dilakukan dengan mempertimbangkan masukan pegawai, dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam organisasi. Keterlibatan pegawai dalam proses ini juga akan membantu meminimalisir kesenjangan persepsi antara manajemen dan pegawai.

Tantangan lain yang teridentifikasi dalam aspek hubungan industrial dalam sektor pemerintahan pada Kantor Duckapil Nias Barat ini adalah perbedaan pandangan mengenai sistem insentif dan penghargaan. Sebagian pegawai merasa bahwa insentif belum cukup merata, sementara pihak manajemen berusaha untuk menyesuaikannya dengan kebijakan internal dan anggaran yang tersedia. Pengelolaan insentif yang lebih transparan dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dapat menjadi

upaya yang baik untuk mendorong motivasi kerja serta memperkuat hubungan kerja yang harmonis.

Dalam struktur pengambilan keputusan, ditemukan bahwa ada kebijakan tertentu yang dirasa oleh pegawai diterapkan secara tiba-tiba tanpa persiapan atau komunikasi yang cukup. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman di antara pegawai dan ketidakpastian mengenai peran mereka dalam kebijakan tersebut. Peningkatan keterlibatan pegawai melalui penyampaian kebijakan yang lebih inklusif akan membantu meningkatkan kejelasan peran mereka dan menumbuhkan rasa memiliki dalam organisasi.

Secara keseluruhan, tantangan hubungan industrial yang dihadapi di kantor ini tidak hanya menyangkut kepuasan pegawai tetapi juga memengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan antara manajemen dan pegawai, diharapkan kualitas hubungan kerja dapat lebih harmonis dan mendukung kinerja bersama yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas hubungan kerja, guna mencapai pelayanan publik yang efisien dan responsif di lingkungan pemerintahan.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Wibowo (2020) tentang "Hubungan Industrial dan Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah" menunjukkan bahwa hubungan industrial yang terbuka dan kolaboratif mampu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas pegawai, yang berujung pada peningkatan produktivitas. Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara atasan dan bawahan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Selain itu, penelitian oleh Sari (2019) yang berjudul "Penerapan Hubungan Industrial di Sektor Publik: Studi Kasus pada Instansi Pemerintah Kota" menyoroti peran kebijakan kesejahteraan pegawai, seperti tunjangan dan pengembangan karier, sebagai faktor kunci dalam memperkuat hubungan industrial. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakpuasan pegawai terhadap kebijakan kesejahteraan dapat menimbulkan penurunan

kinerja, terutama dalam sektor pelayanan publik yang membutuhkan dedikasi tinggi dari pegawainya.

Meskipun kedua penelitian terdahulu tersebut memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya hubungan industrial di sektor publik, namun masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti bagaimana hubungan industrial dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan sosial-ekonomi yang berbeda, seperti halnya di Kabupaten Nias Barat. Kesenjangan inilah yang ingin dieksplor lebih dalam oleh peneliti, penerapan hubungan industrial di Disdukcapil Kabupaten Nias Barat dan faktor-faktor lokal yang memengaruhi efektivitasnya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab kesenjangan terkait dengan bagaimana konflik internal yang muncul akibat hubungan industrial yang buruk dapat diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Kesenjangan ini penting untuk diatasi mengingat Disdukcapil memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan layanan kependudukan kepada masyarakat, yang membutuhkan kecepatan dan akurasi dalam pelayanannya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dalam mengembangkan pengetahuan tentang peran hubungan industrial di sektor pemerintahan, khususnya pada instansi pelayanan publik di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hubungan industrial dalam konteks lokal, serta menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui hubungan industrial yang efektif.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis karena akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nias Barat dalam memperbaiki hubungan industrial di lingkup kerjanya. sehingga implementasi kebijakan yang baik, maka diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal, dan potensi konflik internal dapat diminimalkan.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Analisis Peran Hubungan Industrial dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat."**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hubungan industrial dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hubungan industrial yang terbentuk antara atasan dan bawahan, kebijakan kesejahteraan pegawai, serta komunikasi internal dapat memengaruhi motivasi dan produktivitas kerja pegawai. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penggerak maupun penghambat dalam pelaksanaan hubungan industrial di instansi tersebut, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada permasalahan spesifik yang timbul akibat hubungan industrial yang tidak optimal, seperti konflik internal, ketidakpuasan kerja, dan menurunnya produktivitas pegawai. Berdasarkan hasil observasi awal, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nias Barat guna memperbaiki hubungan industrial dan meningkatkan kinerja pegawai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hubungan industrial dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan hubungan industrial yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran hubungan industrial dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan hubungan industrial yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hubungan industrial memengaruhi kinerja pegawai di sektor pelayanan publik, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat. Peneliti juga akan mendapatkan pengalaman empiris dalam mengidentifikasi faktor-faktor penggerak dan penghambat dalam hubungan industrial di sektor pemerintahan.

b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait hubungan industrial, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.

c. Bagi Universitas Nias dan Akademika

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam konteks hubungan industrial di sektor pemerintahan. Universitas Nias juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk kajian akademik atau penelitian lanjutan oleh mahasiswa dan dosen.

d. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini menyediakan dasar empiris dan konsep yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk memperdalam kajian terkait hubungan industrial di sektor pemerintahan, baik dalam konteks yang sama maupun di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan yang belum terungkap dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.